



ANALISIS KERJASAMA KEAMANAN FILIPINA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN CHINA DALAM KONFLIK KEPULAUAN SPRATLY (2016-2024)

Gracella Satriana^{1*}, Andi Meganingratna²

^{1,2} Prodi Hubungan Internasional, Universitas Fajar, Indonesia

*gracellasatrianaa@gmail.com

Abstract. *The Spratly Islands dispute has emerged as a major source of tension in Southeast Asian geopolitics due to China's increasingly assertive territorial claims and artificial island-building activities. This study examines how the leadership transition from Rodrigo Duterte (2016-2022) to Ferdinand Marcos Jr. (2022-2024) fundamentally altered Philippine security cooperation with the United States in the context of the Spratly Islands conflict. Using a qualitative research methodology with explanatory analysis, this study integrates Neoclassical Realism theory with the concepts of bandwagoning and balancing to analyze how domestic factors mediate foreign policy responses to consistent external pressures. The findings suggest that despite facing identical structural threats from Chinese expansion in the Spratly Islands, the Philippines has adopted very different strategic approaches under different leaderships. Duterte's bandwagoning strategy, characterized by "quiet diplomacy" and economic accommodation, has succeeded in attracting Chinese investment commitments but has failed to prevent China's continued militarization of artificial islands and the consolidation of de facto control over the disputed territory. In contrast, Marcos Jr.'s balancing strategy, which emphasized "transparency diplomacy" and the strengthening of US alliances through expanded access to military bases and increased joint exercises, effectively restored international credibility and enhanced deterrence, but actually increased the risk of direct confrontation. This research validates the core proposition of Neoclassical Realism that domestic factors serve as crucial mediating variables shaping how small states respond to external pressures.*

Keywords: *Spratly Island, US-Philippines Security Cooperation, Bandwagoning, Neoclassical Realism, South China Sea.*

Pendahuluan

Kepulauan Spratly yang berada di wilayah Laut Cina Selatan menjadi pusat dari konflik geopolitik yang rumit, terutama untuk negara China, Filipina, dan Amerika Serikat. Interaksi antara ketiga negara ini yang memiliki potensi untuk meningkatkan sengketa regional menjadi konfrontasi global. Konflik ini telah berlangsung lama, tetapi kembali memanas pada abad ke-20 ketika potensi sumber daya alam dan posisi strategis sebagai jalur perdagangan internasional senilai lebih dari USD 3 triliun per tahun mulai disadari oleh banyak negara di kawasan tersebut (Vuving & Alexander L, 2016). Di antara

beberapa negara yang bersengketa mengenai klaim wilayah ini, China mengklaim sebagian besar kawasan Laut China Selatan melalui Sembilan garis putus-putus atau dikenal dengan istilah *Nine-Dash Line* yang mengambil hampir 90% wilayah yang terdapat di Laut China Selatan, yang dimana hal ini bertentangan dengan “*United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*” sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang penggunaan laut dan samudra (*Permanent Court of Arbitration, n.d.*). Filipina berada dalam posisi unik sebagai negara yang menang dalam kasus hukum Arbitrasi internasional pada tahun 2016, namun secara militer paling lemah di antara semua negara yang bersengketa. Filipina juga memiliki perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat sejak 1951, yang menjadikan kawasan ini sebagai titik yang berpotensi memicu konfrontasi langsung antara kekuatan besar. Amerika Serikat, meskipun tidak mengklaim wilayah, memiliki kepentingan strategis untuk menjaga kebebasan navigasi, menegakkan hukum internasional, dan mempertahankan kredibilitas aliansi (Pedrozo & Raul “Pete,” 2022).



Gambar 1. Klaim Nine-Dash Line China
Sumber: (“*Joining the Dashes,*” 2014)

Gambar diatas memperlihatkan klaim Nine-Dash Line. Hal yang memperkeruh situasi dalam konflik ini adalah ketika China mulai membangun pulau-pulau buatan di Kepulauan Spratly. Hanya dalam rentang waktu 3 tahun pada akhir tahun 2013 dan perkembangan pesat sampai oktober 2016, China berhasil mengubah lanskap geopolitik Kepulauan Spratly melalui pembangunan pulau buatan seluas 960 acres atau 1.5 *square miles* menciptakan fakta di lapangan yang mengabaikan putusan arbitrase internasional Juli 2016 yang memenangkan Filipina (EIA, 2024). Proyek pembangunan pulau buatan ini disebut sebagai “*Great Wall of Sand*” yang merupakan serangkaian proyek reklamasi lahan, M. Paul (2016). Proyek ini ditolak oleh mayoritas sebagian besar masyarakat internasional dan secara resmi dibantah oleh Mahkamah Arbitrase Internasional yang sebelumnya telah diajukan oleh Presiden Filipina Benigno Aquino III tahun 2013 dan pada 2016 keputusan arbitrase memenangkan gugatan Filipina, Natalia (2025). Namun, respons kebijakan Filipina terhadap dinamika ini sangat dipengaruhi oleh konteks domestik dan kepemimpinan nasional. Fenomena ini semakin memanas pada Maret 2021, ketika *Coast Guard China*; kapal badan penegak hukum maritim China yang

bertugas patroli, pengawasan, dan penegakan kedaulatan di perairan yang diklaim China melakukan *water cannon attack* terhadap kapal suplai Filipina di Second Thomas Shoal sebuah tindakan yang menggarisbawahi tak hanya dimensi infrastruktur, tetapi juga konfrontasi maritim langsung di lapangan (Sebastian Strangio, 2024).



Gambar 2. Pembangunan *Great Wall of Sand*
Sumber: (Board, 2015)

Hubungan Filipina-Amerika Serikat memiliki kedekatan yang kuat dalam bidang kerjasama keamanan yang ditandai dengan sejumlah perjanjian, diantaranya yakni Perjanjian Pertahanan Bilateral (*Mutual Defense Treaty*) yang menjadi fondasi utama kerjasama militer dan keamanan. Kemudian, perjanjian *Visiting Force Agreement* (VFA) (Pitlo III, 2020) dan *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) sebagai perjanjian yang memperkuat keberadaan militer Amerika Serikat di Filipina (Parameswaran, 2016). Perjanjian tersebut memungkinkan latihan militer bersama dan akses ke fasilitas militer Filipina oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat sekaligus juga sebagai bagian dari strategi untuk mengimbangi pengaruh China yang semakin ekspansif. Berdasarkan perjanjian-perjanjian kerjasama keamanan ini juga sebagai bagian dari strategi untuk mengimbangi pengaruh China yang sejak dulu semakin dan selalu ekspansif.

Historis hubungan Filipina-Amerika Serikat mengalami pasang surut dipengaruhi oleh pemimpinnya. Pada masa pemerintahan Presiden Fidel Ramos (1992-1998) dan Joseph Estrada (1998-2001) menunjukkan orientasi paling kuat terhadap AS. Ramos menerapkan kebijakan pro-Barat dengan memperkuat kerjasama militer dan ekonomi, sementara Estrada mempertahankan kedekatan dengan AS meskipun mulai membuka hubungan ekonomi terbatas dengan China. Sedangkan, pada masa pemerintahan Gloria Arroyo (2001-2010) tetap mengutamakan kerjasama keamanan dengan AS sebagai prioritas utama, meski juga memperluas hubungan ekonomi dengan China. Bahkan, pada masa pemerintahan Benigno Aquino III (2010-2016) semakin memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, terutama ketika ketegangan dengan China meningkat di Laut China Selatan (Rowman & Littlefield, 2017).

Namun, sejak Masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte (2016–2022) dalam penelitian Abinales (2017) menandai perubahan besar dalam kebijakan luar negeri Filipina, yaitu ketika Filipina mengadopsi pendekatan strategi *bandwagoning*. *Bandwagoning* adalah strategi yang dipilih oleh negara-negara yang merasa tidak mampu menyeimbangkan kekuatan besar secara militer maupun politik (Cheng-Chwee Kuik, 2021). Hal ini tercermin di masa pemerintahan Duterte dengan mengikuti kekuatan tersebut, negara berharap mendapat perlindungan atau keuntungan material, meskipun hal ini bisa mengurangi otonomi kebijakan luar negeri mereka. Dalam banyak kasus, *bandwagoning* mencerminkan kompromi antara kedaulatan dan kelangsungan rezim. Terlihat dengan mengabaikan kemenangan hukum dari Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 yang telah diperjuangkan di masa pemerintahan Benigno Aquino, untuk \$24 miliar investasi China sebagai *trade-off* kedaulatan; kondisi di mana sebuah negara harus menentukan prioritas di antara berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kedaulatan, yang sering kali menuntut pengorbanan terhadap salah satu aspek demi memperoleh manfaat pada aspek kedaulatan lainnya. Hal ini juga disebut dengan “*Pivot to China*” yang ditandai oleh pelemahan implementasi perjanjian militer dengan Amerika Serikat seperti pada perjanjian VFA dan EDCA (Thao, 2019).

Sebaliknya, pemerintahan Presiden Ferdinand Marcos Jr. (2022–2024) menunjukkan pembalikan arah kebijakan dengan memperkuat kembali hubungan keamanan dengan Amerika Serikat. Marcos Jr mengambil pendekatan yang berbeda dengan pendahulunya yakni dengan mengadopsi strategi *balancing* dalam menghadapi meningkatnya tekanan dari China di kawasan Laut Cina Selatan. *Balancing* adalah strategi yang digunakan oleh suatu negara untuk menyeimbangkan kekuatan atau pengaruh negara lain yang dianggap sebagai ancaman, T. V. Paul dkk., (2004). Mendukung pernyataan mengenai *balancing*, Wojciuk (2021) berpendapat bahwa *balancing* hanya mungkin terjadi jika struktur ideational aktor (misalnya norma, nilai, dan kerangka berpikir) sinkron dengan struktur sistem internasional di sekitarnya. Jadi, sistem internasional yang baru harus saling cocok dengan cara pandang negara tersebut. Dalam tulisannya, He (2008) mengelompokkan *Balancing* menjadi dua yaitu *Hard Balancing* dan *Soft Balancing*. *Hard Balancing* mencakup tindakan negara seperti peningkatan kekuatan militer, perlombaan senjata, dan pembentukan aliansi militer untuk melawan negara yang lebih kuat atau yang tampil sebagai ancaman. Sedangkan, *Soft Balancing* merupakan suatu pendekatan ini menekankan bahwa negara dapat melakukan *balancing* melalui instrumen non-militer, yakni melalui pembentukan, penggunaan, dan penguasaan lembaga multilateral demi mengendalikan atau menghadapi tekanan dari kekuatan atau sistem internasional. Dan apa yang dilakukan Filipina saat pemerintahan Presiden Marcos Jr. dapat dikelompokkan ke dalam adalah *Hard Balancing* terlihat dari diplomasi transparan dan respons militer yang terukur, yang dimana Filipina memperkuat kerja sama pertahanannya dengan Amerika Serikat ditandai dengan pemberian akses ke sembilan

pangkalan militer serta pelaksanaan latihan gabungan (Shang-Su Wu & Albao, J. D. P., 2023).

Dalam konteks eskalasi kompleksitas di kawasan Laut Cina Selatan, negara Filipina memang menempati posisi yang strategis sebagai salah satu aktor utama yang terlibat langsung dalam sengketa wilayah Kepulauan Spratly. Kepulauan Spratly mengendalikan jalur perdagangan senilai \$3.4 triliun per tahun (21% perdagangan global), dengan China, Jepang, dan Korea Selatan sangat bergantung pada jalur ini untuk pasokan energi (EIA, 2024). Dapat dikatakan bahwa sepertiga dari seluruh perdagangan maritim global melewati perairan sekitar Kepulauan Spratly yang terletak dilaut China Selatan, membuat setiap perubahan kebijakan Filipina berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi Asia-Pasifik (Holt, 2022).

Dalam menjelaskan dinamika kebijakan kerjasama keamanan Filipina–Amerika Serikat berubah dalam konteks konflik Laut Cina Selatan, penelitian ini menggunakan pendekatan realisme neoklasik. Realisme neoklasik, sebagaimana dikembangkan oleh Rose (1998), menawarkan sintesis antara realisme struktural dan analisis tingkat unit dengan mengintegrasikan variabel domestik dalam analisis kebijakan luar negeri. Teori ini berpendapat bahwa meskipun distribusi kekuatan dalam sistem internasional memberikan insentif dan batasan struktural, respons negara terhadap tekanan tersebut dimediasi oleh faktor-faktor domestik seperti persepsi elite, latar belakang kepemimpinan, legitimasi politik dan kapasitas negara (Rose, 1998). Sejalan dengan hal tersebut Chandra dalam tulisannya menjelaskan bahwa tekanan dari sistem internasional tidak langsung menjadi kebijakan luar negeri, tetapi harus melalui "variabel perantara" seperti persepsi pemimpin, kapasitas negara, dan dinamika politik domestik. *Framework* ini sangat berguna untuk memahami mengapa Filipina mengubah kebijakannya secara drastis dari era Duterte ke Marcos Jr., meskipun ancaman dari China di Kepulauan Spratly relatif sama (Chandra, 2017).

Dalam perspektif Realisme neoklasik membantu menjelaskan mengapa Filipina, meskipun menghadapi tekanan eksternal yang relatif serupa dari China, justru mengadopsi kebijakan luar negeri yang berbeda di bawah dua kepemimpinan yang berbeda. Rodrigo Duterte, memilih mendekat ke China sebagai bagian dari strategi pragmatis domestik, sementara Ferdinand Marcos Jr. justru memperkuat kembali hubungan pertahanan dengan Amerika Serikat. Realisme neoklasik berangkat dari asumsi bahwa tekanan sistem internasional memang memberikan kerangka peluang dan batasan bagi negara, namun keputusan kebijakan luar negeri pada akhirnya dipengaruhi oleh faktor domestik seperti persepsi elite, latar belakang kepemimpinan, legitimasi politik dan kepentingan nasional yang spesifik. Dalam konteks ini, Filipina sebagai negara yang menghadapi tekanan sistem internasional yang dimaksud ekspansi China di Kepulauan Spratly didapati berubah kebijakan luar negerinya ketika terjadi perubahan pemimpin.

Dalam perspektif realisme struktural, konsistensi ancaman China yang bahkan mengintensifkan kontrol de facto atas 80% wilayah sengketa seharusnya menghasilkan respons kebijakan yang konsisten pula (Rabena, 2018). Namun, realitas menunjukkan sebaliknya: Filipina bergeser dari strategi akomodasi yang memprioritaskan keuntungan ekonomi jangka pendek menuju strategi konfrontasi yang meningkatkan risiko eskalasi militer. Variasi kebijakan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor di luar tekanan sistem internasional khususnya dimensi domestik kepemimpinan memainkan peran determinan dalam pembentukan orientasi strategis negara kecil. Lebih lanjut untuk memahami fenomena di kepulauan Spratly terkait dengan variasi kebijakan negara Filipina dapat dijelaskan melalui konsep *Bandwagoning* dan *Balancing* yang dapat menjelaskan bahwa meski menghadapi intensifikasi ekspansi China yang konsisten di Kepulauan Spratly dari pembangunan '*Great Wall of Sand*' (2013-2016) (Board, 2015), hingga militarisasi pulau buatan Filipina justru menunjukkan respons kebijakan yang kontradiktif. Paradoks ini terlihat jelas antara strategi akomodatif Presiden Rodrigo Duterte (2016-2022) yang memilih *bandwagoning* dengan China, dan pendekatan konfrontatif Presiden Ferdinand Marcos Jr. (2022-2024) yang mengadopsi strategi *balancing* melalui penguatan aliansi dengan Amerika Serikat.

Bandwagoning, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Waltz (1979) dan Schweller (1994), merujuk pada strategi negara untuk menyesuaikan diri dengan kekuatan dominan demi memperoleh keuntungan atau menghindari kerugian. Duterte mengimplementasikan '*profit accommodation*' dengan mengorbankan kemenangan arbitrase internasional 2016 demi \$24 miliar komitmen investasi China, sambil mengadopsi '*quiet diplomacy*' dalam menghadapi insiden maritim di Second Thomas Shoal dan Scarborough Shoal. Sebaliknya, *balancing* mengacu pada upaya negara membentuk koalisi atau memperkuat kapasitas untuk melawan kekuatan dominan yang dianggap mengancam. Marcos Jr. mewujudkan strategi ini melalui pemberian akses 9 pangkalan militer kepada AS, peningkatan 250% intensitas latihan Balikatan, dan adopsi '*transparency diplomacy*' untuk memobilisasi dukungan internasional melawan agresivitas China (Santarita & Gerstl, 2024).

Motin (2024) dalam bukunya "*Bandwagoning in International Relations: China, Russia, and Their Neighbors*" mengidentifikasi bahwa *bandwagoning* telah menjadi pilihan yang langka di Asia dan Eropa kontemporer, suatu temuan yang diperkuat oleh analisis statistik Carter (2022) yang mendemonstrasikan bahwa negara lemah cenderung membentuk aliansi *bandwagoning* dengan agresor regional tetangga hanya dalam kondisi spesifik ketika menghadapi ancaman eksternal yang signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Camba (2023) menganalisis bagaimana Filipina membentuk kebijakan luar negerinya terhadap Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Camba

berargumen bahwa kebijakan luar negeri Filipina terhadap China tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu faktor tunggal, melainkan melalui kombinasi tiga faktor utama: politik domestik, pertimbangan geopolitik, dan realitas ekonomi. Dalam tulisannya Camba menekankan pentingnya “*political survival*” sebagai kerangka analitis, dimana para pimpinan Filipina berupaya mempertahankan kekuasaan dengan mengakumulasi dukungan politik dan menangkal penantang. Sebaliknya, strategi *balancing* yang diadopsi Ferdinand Marcos Jr. dalam menghadapi ekspansi China di Kepulauan Spratly memiliki justifikasi teoretis yang kuat dalam literature hubungan internasional. Penelitian yang dilakukan oleh Haacke (2003) dalam “*ASEAN's Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospects*” menunjukkan bahwa negara-negara Asia Tenggara, termasuk Filipina, cenderung mengadopsi strategi *balancing* ketika menghadapi ancaman eksistensial terhadap kedaulatan teritorial mereka. Haacke berargumen bahwa meskipun ASEAN menganut prinsip non-interferensi, negara anggota akan mencari dukungan eksternal ketika stabilitas domestik dan integritas teritorial terancam. Dalam konteks Kepulauan Spratly, intensifikasi militerisasi China sejak 2016 telah menciptakan “*security dilemma*” yang mendorong Filipina untuk mencari *counterbalancing* melalui penguatan aliansi dengan Amerika Serikat.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan penting mengenai mengapa orientasi kerjasama keamanan Filipina dengan Amerika Serikat mengalami transformasi dalam konteks kepulauan spratly, meski ancaman struktural dari ekspansi China yang sama. Dalam konteks ini, penelitian ini mengadopsi teori realisme neoklasik dan konsep bandwagoning sebagai kerangka analisis untuk memahami dinamika kerjasama keamanan Amerika Serikat-Filipina dalam konflik Kepulauan Spratly selama periode 2016–2024.

Metode Penelitian

Penelitian ini menganalisis kerjasama keamanan Filipina dengan Amerika Serikat dan China dalam konflik Kepulauan Spratly (2016-2024) menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis eksplanatoris untuk membahas bagaimana perubahan kebijakan keamanan Filipina terhadap Amerika Serikat berlangsung selama masa pemerintahan Rodrigo Duterte sampai Ferdinand Marcos Jr. Metode ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terkait faktor domestik dengan perubahan kebijakan luar negeri dalam konteks tekanan sistem internasional yang relatif konstan.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber seperti dokumen resmi pemerintah berupa teks *perjanjian Mutual Defense Treaty* (1951), *Visiting Forces Agreement* (1998), *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (2014), serta dokumen kebijakan luar negeri periode Duterte dan Marcos Jr. Selanjutnya, pidato dan pernyataan resmi kedua presiden terkait kebijakan Laut Cina Selatan yang diperoleh dari situs resmi *Malacañang Palace*.

Kemudian, putusan Mahkamah Arbitrase Internasional 2016 dalam kasus Filipina vs. China. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mencari tahu alasan-alasan di balik perubahan kebijakan luar negeri Filipina pada dua masa pemerintahan yang berbeda. Periodisasi penelitian mencakup era kepemimpinan Duterte (2016-2022) dan awal masa kepemimpinan Marcos Jr. (2022-2024). Fokus analisis diarahkan pada kebijakan terkait konflik Kepulauan Spratly dan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, dengan perhatian khusus pada implementasi Realisme Neoklasik serta konsep *bandwagoning* dan *balancing* dalam strategi kebijakan luar negeri.

Hasil dan Pembahasan

Era Duterte (2016-2022)

Masa kepemimpinan Rodrigo Duterte menandai pergeseran kebijakan yang mencolok dalam orientasi kebijakan luar negeri Filipina terhadap konflik Kepulauan Spratly. Meskipun Filipina berhasil memenangkan arbitrase internasional melawan klaim China di Laut China Selatan pada Juli 2016, Duterte memilih pendekatan yang kontroversial dengan tidak menekan implementasi putusan tersebut. Keputusan ini mencerminkan adopsi strategi *profit accommodation* yang mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek dibandingkan penegakan kedaulatan hukum internasional. Selama masa kepemimpinan Duterte, China berkomitmen menanamkan modal senilai US\$24 miliar di Filipina lewat berbagai proyek infrastruktur dalam kerangka *Belt and Road Initiative* (BRI) (Hart, 2021). Mayoritas dana tersebut dialokasikan pada sektor transportasi, energi, dan telekomunikasi, termasuk proyek andalan seperti Chico River Pump Irrigation Project sebesar US\$62 juta dan Kaliwa Dam Project senilai US\$211 juta. Akan tetapi, hingga akhir 2021 realisasi investasi baru mencapai sekitar 60% dari total komitmen yang dijanjikan (Pransuamitra, 2023).

Pendekatan *quiet diplomacy* Duterte termanifestasi dalam penanganan insiden maritim di kawasan sengketa. Ketika Coast Guard China melakukan *water cannon attack* terhadap kapal supply Filipina di Second Thomas Shoal pada Maret 2021, respons pemerintah Duterte terbatas pada protes diplomatik tanpa publikasi luas atau mobilisasi dukungan internasional. Begitu pula insiden di Scarborough Shoal, dimana aktivitas fishing militia China ditangani melalui jalur diplomatik bilateral tanpa melibatkan mekanisme multilateral ASEAN atau forum internasional lainnya. Strategi ini menghasilkan trade-off yang signifikan antara keuntungan ekonomi dan kedaulatan teritorial. Meskipun Filipina memperoleh komitmen investasi substansial, China tetap melanjutkan aktivitas reklamasi dan militarisasi di kawasan Spratly tanpa hambatan diplomatik yang berarti. Data satelit menunjukkan bahwa selama era Duterte, China menyelesaikan konstruksi fasilitas militer di Fiery Cross Reef, Subi Reef, dan Mischief Reef, termasuk instalasi sistem pertahanan udara dan fasilitas radar canggih.

Faktor domestik berupa persepsi elite dan latar belakang kepemimpinan menjadi determinan utama dalam perubahan kebijakan ini. Duterte, dengan latar belakang sebagai walikota Davao yang memiliki pengalaman langsung dengan komunitas Tionghoa-Filipina, mengembangkan persepsi bahwa konfrontasi langsung dengan China akan kontraproduktif bagi kepentingan ekonomi Filipina. Persepsi ini diperkuat oleh penilaiannya terhadap ketidakseimbangan kekuatan militer yang signifikan antara Filipina dan China, yang membuatnya meyakini bahwa strategi *bandwagoning* merupakan pilihan rasional untuk memaksimalkan keuntungan sambil meminimalkan risiko konflik.

Latar belakang kepemimpinan Duterte sebagai populis yang mengutamakan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek juga mempengaruhi orientasi kebijakannya. Dalam konteks realisme neoklasik, variabel domestik berupa preferensi pemimpin ini memediasi respons Filipina terhadap tekanan sistem internasional. Duterte secara konsisten menunjukkan pendekatan pragmatis dalam kebijakan luar negeri, memisahkan antara retorika populis domestik dan diplomasi pragmatis internasional (Christine B Tenorio dkk., 2022). Persepsi elit ini kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret berupa pelemahan implementasi kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat dan pencarian akomodasi dengan China melalui mekanisme investasi dan kerjasama ekonomi.

Legitimasi politik dan strategi survival politik menjadi faktor domestik krusial yang menjelaskan adopsi strategi *bandwagoning* oleh Duterte. Dalam kerangka realisme neoklasik, legitimasi politik domestik mempengaruhi kemampuan pemimpin untuk menerjemahkan tekanan sistem internasional kedalam kebijakan luar negeri. Duterte membangun legitimasi politiknya melalui narasi nasionalisme anti-Barat dan janji kemakmuran ekonomi melalui kerjasama dengan China. Strategi "*pivot to China*" berfungsi sebagai diferensiasi politik dari pemerintahan Aquino III yang dinilai terlalu pro-Amerika dangkal menghasilkan manfaat ekonomi konkret dari kemenangan arbitrase 2016. Dengan merangkul China dan mengorbankan kemenangan hukum internasional, Duterte berhasil memobilisasidukungan kelompok bisnis yang mengantisipasi peluang ekonomi dari *Belt and Road Initiative* (BRI). Komitmen investasi China senilai \$24 miliar menjadi instrumen legitimasi politik yang memungkinkan Duterte mempertahankan popularitas tinggi meski mengadopsi kebijakan kontroversial. Dalam konteks ini, faktor domestik berupa dinamika politik dalam negeri secara signifikan mempengaruhi respons Filipina terhadap ancaman eksternal, sejalan dengan proposisi utama realisme neoklasik bahwa tekanan sistem internasional dimediasi oleh variabel domestik.

Lebih lanjut yang juga berkaitan dengan hal tersebut adalah dalam konteks Filipina, keterbatasan anggaran pertahanan yang hanya 1,1% dari PDB dan modernisasi militer

yang tertinggal pada pendahulu Duterte menciptakan batasan struktural terhadap adopsi strategi balancing yang memerlukan investasi pertahanan masif (Chavez, 2024). Kondisi ini memaksa Duterte mengadopsi "*quiet diplomacy*" sebagai strategi adaptif untuk mengelola eskalasi konflik sambil mempertahankan kedaulatan nominal. Implementasi *quiet diplomacy* terlihat dalam respons Filipina terhadap insiden Second Thomas Shoal dan militarisasi pulau buatan China. Alih-alih mengintensifkan kerjasama militer dengan Amerika Serikat, Duterte memilih pendekatan diplomasi bilateral dan multilateral melalui mekanisme ASEAN-China. Kapasitas negara yang terbatas juga tercermin dalam ketergantungan Filipina terhadap bantuan pembangunan China untuk proyek infrastruktur strategis. Namun, strategi ini terbukti gagal menghentikan ekspansi China, yang justru mengintensifkan kontrol *de facto* atas wilayah sengketa melalui pembangunan *Great Wall of Sand* dan militarisasi progresif.

Era Marcos Jr. (2022-2024)

Kepemimpinan Marcos Jr. menandai pembalikan signifikan dalam orientasi kebijakan luar negeri Filipina. Sejak awal masa jabatannya, Marcos Jr. menunjukkan komitmen untuk memperkuat kembali aliansi dengan Amerika Serikat sambil mempertahankan hubungan ekonomi yang baik dengan China. Faktor domestik berupa latar belakang kepemimpinan dan jaringan elite politik Marcos Jr. ini mempengaruhi reorientasi kebijakan luar negeri Filipina. Berbeda dengan Duterte, Marcos Jr. mewarisi jaringan politik *establishment* yang historis memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat. Persepsi elite ini diperkuat oleh penilaian bahwa strategi akomodasi Duterte gagal menghasilkan kemajuan signifikan dalam penyelesaian sengketa Spratly, bahkan memungkinkan China mengkonsolidasikan kontrol *de facto* atas wilayah tersebut.

Perubahan persepsi elite juga dipengaruhi oleh eskalasi agresivitas China yang terjadi selama masatransisi kepemimpinan. Insiden *water cannon attack* terhadap kapal suplai Filipina di Second Thomas Shoal pada Maret 2021 dan intensifikasi patroli Coast Guard China menciptakan momentum politik untuk perubahan kebijakan (Mahadzir, 2023). Insiden ini merupakan manifestasi eskalasi ketegangan geopolitik di Laut China Selatan, di mana China Coast Guard menggunakan taktik koersif non-letal untuk mencegah misi resupply rutin Filipina ke BRP Sierra Madre yang sengaja dikaramkan di atol tersebut sejak 1999 sebagai basis militer *de facto*. China yang menggunakan kekuatan paramiliter untuk menegaskan klaim teritorialnya berdasarkan "nine-dash line" tanpa memicu konflik militer terbuka, sementara Filipina memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional mengingat Second Thomas Shoal berada dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Filipina sesuai UNCLOS. Insiden ini menunjukkan kompleksitas dinamika kekuasaan regional di mana taktik intimidasi bertahap digunakan untuk mengubah *status quo* teritorial tanpa melanggar ambang batas yang dapat memicu respons militer dari sekutu Filipina, khususnya Amerika Serikat melalui Mutual Defense Treaty. Marcos Jr. menginterpretasikan pola perilaku China sebagai indikasi bahwa strategi *bandwagoning* tidak menghasilkan prinsip timbal balik

yang diharapkan atau *reciprocity* yang diharapkan, melainkan justru mengundang ekspansi lebih lanjut. Dalam kerangka realisme neoklasik, perubahan persepsi ancaman ini memediasi respons Filipina terhadap tekanan sistem internasional yang tetap konstan (Rose, 1998).

Marcos Jr. membangun legitimasi politik domestik melalui narasi nasionalisme assertif yang berbedasecara diametral dengan pendekatan Duterte. Strategi legitimasi ini berfokus pada pemulihan kredibilitas internasional Filipina dan penegasan kedaulatan teritorial melalui diplomasi transparan. Berbeda dengan *quiet diplomacy* era Duterte, Marcos Jr. mengadopsi "*transparency diplomacy*" (Little, 2007) yang secara terbuka mengekspos agresivitas China kepada masyarakat internasional (Manfredi Sánchez dkk., 2017). Strategi ini berfungsi ganda: memobilisasi dukungan domestik melalui sentimen nasionalis dan membangun koalisi internasional untuk mengimbangi kekuatan China.

Dimensi survival politik Marcos Jr. juga berbeda dengan pendahulunya. Jika Duterte membangun legitimasi melalui janji kemakmuran ekonomi dari kerjasama China, Marcos Jr. memposisikan dirinya sebagai pembela kedaulatan nasional yang tidak akan mengorbankan teritorial *integrity* demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Kebijakan ini mendapat dukungan luas dari kalangan politik, militer, dan masyarakat sipil yang menganggap strategi Duterte terlalu lunak terhadap China dan tidak menguntungkan Filipina. Reorientasi legitimasi politik ini memungkinkan Marcos Jr. mengadopsi strategi *balancing* tanpa menghadapi resistensi domestik yang signifikan.

Penguatan kemampuan negara menjadi prioritas utama dalam strategi penyeimbangan kekuatan Marcos Jr., yang diwujudkan melalui penguatan kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat. Perluasan akses pangkalan militer dari 5 menjadi 9 lokasi strategis dalam kerangka Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang diperkuat (Acosta & Lagrone Sam, 2023), mencerminkan upaya sistematis untuk meningkatkan kemampuan pencegahan Filipina. Kebijakan ini didukung oleh peningkatan anggaran pertahanan dan percepatan program modernisasi Angkatan Bersenjata Filipina melalui pembelian dan pembiayaan peralatan militer dari Amerika Serikat.

Peningkatan kemampuan juga terlihat dalam penguatan latihan militer gabungan Balikatan dengan peningkatan 250% dibandingkan era Duterte (Gonzalez, 2023). Latihan ini tidak hanya berfungsi untuk membangun kepercayaan, tetapi juga sebagai peringatan kepada China bahwa Filipina memiliki kemampuan dan kemauan untuk mempertahankan kedaulatannya. Dalam perspektif teori hubungan internasional, peningkatan kemampuan negara ini memungkinkan Filipina mengadopsi strategi penyeimbangan kekuatan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan sumber daya. Perubahan kemampuan ini juga menciptakan momentum

untuk diplomasi yang lebih tegas dalam forum regional seperti ASEAN dan konvensi hukum laut internasional.

Perbandingan Faktor Faktor Dalam Negeri Sebagai Penentu Kebijakan Luar Negeri

Perbedaan cara kedua pemimpin membangun dukungan politik menunjukkan bagaimana faktor dalam negeri mempengaruhi pilihan kebijakan luar negeri. Duterte membangun legitimasi melalui kritik terhadap mentalitas terjajah dan janji kemakmuran melalui kerjasama dengan berbagai negara (Magcamit, 2020). Strategi ini berhasil karena masih ada sentimen anti-Amerika di Filipina, terutama di kalangan masyarakat yang merasa tidak mendapat manfaat dari hubungan tradisional dengan Amerika. Sebaliknya, Marcos Jr. membangun legitimasi melalui upaya memulihkan kredibilitas internasional Filipina dan membela kedaulatan nasional yang sesuai dengan keinginan Filipina untuk menjadi negara menengah yang dihormati (Michael I Magcamit & Aries A Arugay, 2024).

Perbedaan strategi bertahan dalam politik ini juga terlihat dalam pembentukan koalisi yang berbeda. Duterte membangun koalisi dengan kelompok pengusaha yang tertarik pada peluang ekonomi dari China dan masyarakat yang mengutamakan pembangunan infrastruktur. Marcos Jr. membangun koalisi dengan kalangan politik mapan, pimpinan militer, dan masyarakat sipil yang mengutamakan kedaulatan wilayah dan hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan politik dalam negeri memainkan peran penting dalam pemilihan strategi besar, sesuai dengan teori hubungan internasional. Perbedaan cara kedua pemimpin membangun dukungan politik juga menunjukkan bagaimana faktor dalam negeri mempengaruhi pilihan kebijakan luar negeri. Duterte membangun dukungan melalui kritik terhadap "mentalitas terjajah" dan janji kemakmuran melalui kerjasama dengan berbagai negara (Camba, 2023b). Strategi ini berhasil karena masih ada perasaan anti-Amerika di Filipina, terutama di kalangan masyarakat yang merasa tidak mendapat manfaat dari hubungan tradisional dengan Amerika. Sebaliknya, Marcos Jr. membangun dukungan melalui upaya memulihkan nama baik Filipina di mata internasional dan membela kedaulatan negara yang sesuai dengan keinginan Filipina untuk menjadi negara menengah yang dihormati.

Disamping itu, perbedaan strategi bertahan dalam kekuasaan ini juga terlihat dalam pembentukan kelompok pendukung yang berbeda. Duterte membangun kelompok pendukung dengan para pengusaha yang tertarik pada peluang ekonomi dari China dan masyarakat yang mengutamakan pembangunan infrastruktur. Marcos Jr. membangun kelompok pendukung dengan kalangan politik mapan, pimpinan militer, dan organisasi masyarakat yang mengutamakan kedaulatan wilayah dan hukum internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan politik dalam negeri memainkan peran penting dalam pemilihan strategi nasional, sesuai dengan teori hubungan internasional (De Castro, 2024).

Kemudian, Evolusi kapasitas negara Filipina dari era Duterte ke era Marcos Jr. memberikan ilustrasi yang jelas tentang bagaimana perubahan kemampuan domestik suatu negara dapat mempengaruhi kelayakan pilihan-pilihan strategis dalam hubungan internasional. Masa kepemimpinan Duterte ditandai dengan berbagai keterbatasan kapasitas yang pada akhirnya memaksa negara untuk mengadopsi strategi bandwagoning sebagai bentuk adaptasi terhadap kelemahan struktural yang dimiliki. Keterbatasan yang dihadapi Filipina pada era Duterte sangat nyata terlihat dalam beberapa aspek krusial. Anggaran pertahanan yang terbatas menjadi kendala utama dalam membangun kekuatan militer yang memadai, sementara proses modernisasi militer yang tertinggal membuat Filipina sulit bersaing dengan negara-negara tetangga yang lebih maju secara teknologi (Haena Jo, 2018). Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan pembangunan dari negara lain menciptakan struktur insentif yang mendorong negara untuk mengambil sikap akomodatif terhadap kekuatan-kekuatan dominan di kawasan, terutama China.

Kondisi yang berbeda mulai terlihat pada era Marcos Jr., di mana peningkatan kapasitas melalui penguatan aliansi strategis telah membuka ruang bagi Filipina untuk mengadopsi strategi yang lebih tegas dan assertif. Transformasi kapasitas ini tidak hanya terbatas pada aspek material semata, tetapi juga meluas pada dimensi institusional yang sama pentingnya. Penguatan kerja sama keamanan dengan Amerika Serikat tidak hanya meningkatkan kemampuan perangkat keras militer, tetapi juga memperkuat kapasitas institusional untuk melakukan koordinasi strategis dan berbagi informasi intelijen yang vital. Peningkatan kapasitas yang komprehensif ini kemudian memungkinkan Filipina untuk mengadopsi strategi *balancing* yang sebelumnya tidak layak atau tidak mungkin dilakukan karena keterbatasan kemampuan. Dalam perspektif teori realisme neoklasik, perubahan kapasitas negara ini mendemonstrasikan bahwa faktor-faktor domestik tidak hanya berfungsi sebagai mediator dalam merespons tekanan eksternal, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengubah batasan-batasan struktural yang dihadapi suatu negara dalam sistem internasional yang lebih luas.

Dalam konteks kerjasama keamanan Filipina dengan Amerika Serikat dan China dalam konflik Kepulauan Spratly periode 2016-2024, penelitian ini menghasilkan temuan yang menunjukkan sebuah kerumitan yang terjadi pada negara berkembang dalam mengambil keputusan kebijakan luar negeri ketika menghadapi tekanan dari negara-negara besar di kawasan. Masa kepemimpinan Duterte yang lebih ramah dengan China maupun cara Marcos Jr yang lebih tegas adalah masing-masing pasti memiliki alasan yang rasional dan berhasil dalam situasi yang berbeda, meskipun keduanya menghadapi ancaman yang sama berupa perluasan wilayah China di seputaran Kepulauan Spratly. Sehingga, hal ini memunculkan asumsi bahwa kepemimpinan Duterte menunjukkan cara berpikir praktis yang berusaha mendapatkan keuntungan terbesar untuk negara melalui

kerjasama ekonomi. Pendekatan *quiet diplomacy* dan strategi *bandwagoning* yang diterapkan Duterte menunjukkan pemahaman yang baik terhadap keterbatasan kemampuan negara dan upaya untuk menghindari konflik langsung yang bisa merugikan kepentingan nasional. Kelebihan strategi Duterte terletak pada kemampuannya menciptakan kedamaian di kawasan dengan mengurangi ketegangan. Namun demikian, efektivitas jangka panjang cara ini terbukti terbatas dalam menghentikan perluasan wilayah China, bahkan memberikan kesempatan bagi China untuk memperkuat kehadiran militernya di pulau-pulau buatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun strategi yang lebih lunak dapat memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek, cara ini tidak efektif dalam mengamankan wilayah negara untuk jangka panjang.

Pada sisi lain kepemimpinan negara Filipina berikutnya oleh Marcos Jr. menunjukkan pendekatan yang lebih tegas dalam mempertahankan wilayah negara melalui kerjasama dengan banyak negara dan penguatan pertahanan. Penggunaan diplomasi terbuka dan strategi penyeimbangan kekuatan menunjukkan komitmen untuk menegakkan hukum internasional dan mencari dukungan dari komunitas dunia terhadap tindakan agresif China di Laut Cina Selatan. Kelebihan pendekatan Marcos Jr. terletak pada kemampuannya memulihkan nama baik Filipina di mata internasional dan memperkuat posisi tawar melalui penguatan hubungan dengan Amerika Serikat. Pemberian izin 9 pangkalan militer kepada Amerika Serikat dan peningkatan signifikan dalam aktivitas militer bilateral dari 300 kegiatan pada tahun 2020 menjadi 496 kegiatan pada tahun 2023 menunjukkan keseriusan dalam membangun kekuatan pertahanan, yang dimana menunjukkan peningkatan sekitar 65% dalam tiga tahun terakhir (Arugay & Storey, 2023). Strategi ini juga berhasil mengaktifkan kerjasama dengan banyak negara dan memperoleh dukungan internasional yang lebih luas dalam menghadapi klaim sepihak China. Kebijakan dari Marcos Jr. ini menunjukkan pembelajaran dari kegagalan diplomasi yang terlalu lunak di era sebelumnya dan upaya untuk menggunakan strategi yang lebih bertahan lama. Penguatan kemampuan negara melalui modernisasi militer dan peningkatan anggaran pertahanan menciptakan dasar yang lebih kuat untuk diplomasi yang didukung kekuatan militer. Namun, strategi ini juga membawa risiko konflik yang lebih tinggi dan berpotensi menjadikan Filipina sebagai arena pertarungan antara Amerika Serikat dan China. Pendekatan yang lebih keras juga dapat mengurangi ruang untuk diplomasi langsung dengan China dan menghasilkan reaksi yang lebih agresif.

Oleh karena itu, jika dibandingkan dari segi keamanan negara untuk masa depan, pendekatan Marcos Jr. terlihat lebih mampu menjaga keamanan Filipina dalam jangka panjang, meskipun cara ini memang meningkatkan risiko konflik dalam waktu dekat. Strategi Marcos Jr. lebih unggul karena menciptakan pencegahan yang dapat bertahan lama, berbeda dengan diplomasi Duterte yang terlalu lunak sehingga gagal menghentikan China terus memperluas wilayahnya. Selain itu, pendekatan Marcos Jr. juga sejalan dengan hukum internasional dan putusan pengadilan dunia tahun 2016 yang

memenangkan Filipina, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat. Cara Marcos Jr. mencari dukungan dari banyak negara melalui diplomasi terbuka juga terbukti lebih efektif dalam menciptakan keamanan bersama dibandingkan hanya berdiplomasi dengan satu atau dua negara saja. Meski demikian, pendekatan Duterte tetap memiliki nilai penting dalam menjaga kedamaian kawasan untuk sementara waktu dan mencegah konflik langsung pecah. Diplomasi diam-diam yang dilakukan Duterte memang berhasil mencegah berbagai insiden di laut berkembang menjadi konflik terbuka, walaupun tidak bisa menghentikan China terus membangun dan memperluas wilayahnya di kawasan tersebut.

Penelitian ini membuktikan bahwa kondisi dan kepentingan dalam negeri sangat menentukan bagaimana sebuah negara merespons tekanan dari negara lain. Meskipun Filipina menghadapi ancaman yang sama dari China, ternyata perbedaan latar belakang pemimpin, cara pandang para elite politik, dan strategi masing-masing presiden dalam mempertahankan kekuasaan menghasilkan kebijakan yang sangat berbeda. Temuan ini menunjukkan bahwa untuk negara-negara berkembang seperti Filipina, faktor dalam negeri justru lebih berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan luar negeri dibandingkan tekanan dari luar negeri. Hal ini penting untuk memahami mengapa hubungan antar negara bisa berubah-ubah dan mengapa sulit memprediksi perilaku suatu negara hanya berdasarkan ancaman yang dihadapinya.

Kedua cara kepemimpinan ini memberikan kontribusi yang berbeda untuk menjaga kestabilan kawasan. Cara Duterte membantu menjaga kedamaian dalam waktu singkat dengan mengurangi ketegangan dan mencegah konflik langsung, sedangkan cara Marcos Jr. lebih berkontribusi untuk kestabilan jangka panjang dengan memperkuat pertahanan dan menegakkan hukum internasional. Jika dilihat secara keseluruhan, menggabungkan hal-hal terbaik dari kedua pendekatan yaitu kepraktisan ekonomi dari Duterte dan ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan dari Marcos Jr. bisa menghasilkan strategi yang lebih baik untuk menghadapi rumitnya situasi politik di kawasan Laut Cina Selatan. Ini menunjukkan bahwa pilihan kebijakan tidak harus selalu ekstrem antara bersikap lunak atau keras, tetapi negara berkembang bisa menggunakan strategi gabungan yang bisa memaksimalkan keuntungan sambil mengurangi risiko yang dihadapi.

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa perubahan kebijakan Filipina terhadap konflik Kepulauan Spratly lebih banyak dipengaruhi oleh faktor dalam negeri daripada tekanan dari luar. Meskipun ancaman dari China tetap sama, cara Filipina merespons berubah drastis dari masa Duterte ke Marcos Jr karena perbedaan latar belakang dan kepentingan politik kedua pemimpin. Hasil dari penelitian ini dapat diterapkan pada negara-negara

kecil lainnya yang dalam hal ini sedang atau telah memiliki perjanjian keamanan dengan negara besar dan menghadapi konflik wilayah di kawasan mereka.

Masa kepemimpinan Duterte menunjukkan pendekatan yang ramah terhadap China dengan harapan mendapat keuntungan ekonomi. Duterte memilih strategi ini karena pengalamannya sebagai walikota Davao yang punya hubungan ekonomi baik dengan China, popularitas tinggi yang memberi ruang untuk kebijakan kontroversial, dan memanfaatkan sentimen anti-Amerika di masyarakat. Hasilnya, Duterte mengabaikan kemenangan arbitrase internasional melawan China, mengurangi kerjasama militer dengan AS, dan menggunakan diplomasi diam-diam. Meski berhasil menarik investasi China sekitar 24 miliar dollar, pendekatan ini tidak menghentikan ekspansi China di kawasan sengketa. Sebaliknya, Marcos Jr menerapkan kebijakan yang berlawanan dengan kembali memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat. Perubahan ini didorong oleh latar belakang keluarga Marcos yang punya sejarah dengan AS, kebutuhan memperbaiki citra internasional keluarga, dan keyakinan bahwa aliansi dengan AS akan memberikan legitimasi yang lebih kuat. Marcos Jr memberikan akses pangkalan militer tambahan kepada AS, memperbesar latihan militer, dan secara terbuka mengkritik tindakan China.

Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu peneliti akui, diantaranya keterbatasan akses informasi yang dimana terdapat beberapa dokumen-dokumen rahasia militer atau catatan rapat tertutup pemerintah yang mungkin memberikan gambaran lebih lengkap tentang proses pengambilan keputusan. Kedua, keterbatasan waktu yang dimana periode kepemimpinan Marcos Jr. masih berlangsung hingga saat penelitian ini dilakukan, sehingga belum dapat sepenuhnya dinilai dampak jangka panjang dari kebijakan-kebijakannya. Evaluasi yang lebih komprehensif memerlukan waktu lebih lama untuk melihat hasil yang sebenarnya. Ketiga, keterbatasan metode yang dimana penelitian ini menggunakan data yang dapat diamati dari luar, seperti pidato publik, dokumen resmi, dan laporan media, bukan dari pengamatan langsung atau wawancara dengan pengambil keputusan. Sehingga, hal ini berarti tidak ada kepastian secara mutlak bahwa faktor-faktor yang kami identifikasi benar-benar menjadi penyebab utama perubahan kebijakan.

Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam situasi internasional yang sama, negara kecil bisa menghasilkan kebijakan yang sangat berbeda tergantung pada faktor domestik. Kedua pendekatan memiliki trade-off masing-masing. Duterte berhasil menarik investasi China tapi gagal menghentikan ekspansinya dan melemahkan posisi strategis Filipina. Marcos Jr berhasil memperkuat keamanan tapi meningkatkan risiko konfrontasi langsung dengan China. Temuan ini memperkuat teori bahwa faktor domestik, terutama latar belakang dan kepribadian pemimpin, seringkali lebih menentukan kebijakan luar negeri negara berkembang daripada tekanan struktural

internasional. Hal ini menunjukkan bahwa kestabilan aliansi internasional tidak permanen dan bisa berubah dengan pergantian pemimpin, meskipun ancaman keamanan tetap sama.

Referensi

- Abinales, P. N. (2017). Philippines-US Relations. Dalam *Oxford Research Encyclopedia of American History* (Online Edition). Oxford University Press.
<https://oxfordre.com/americanhistory/display/10.1093/acrefore/9780199329175.001.0001/acrefore-9780199329175-e-404>
- Acosta, R. & Lagrone Sam. (2023, Februari 2). *U.S., Philippines Add Four More Sites to EDCA Military Basing Agreement* [Blog]. USNI News.
<https://news.usni.org/2023/02/02/u-s-philippines-add-four-more-sites-to-edca-military-basing-agreement>
- Arugay, A. A., & Storey, I. (2023). 2023/40 “A Strategic Reset?: The Philippines-United States Alliance under President Marcos Jr.” by Aries A. Arugay and Ian Storey. 2023(No. 40). <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2023-40-a-strategic-reset-the-philippines-united-states-alliance-under-president-marcos-jr-by-aries-a-arugay-and-ian-storey/>
- Board, E. (2015, April 8). Opinion | A ‘Great Wall of Sand’ in the South China Sea. *The Washington Post*. https://www.washingtonpost.com/opinions/a-great-wall-of-sand/2015/04/08/d23adb3e-dd6a-11e4-be40-566e2653afe5_story.html
- Camba, A. (2023a). From Aquino to Marcos: Political survival and Philippine foreign policy towards China. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 12(1), 9–31.
<https://doi.org/10.1080/24761028.2023.2281165>
- Camba, A. (2023b). From Aquino to Marcos: Political survival and Philippine foreign policy towards China. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 12(1), 9–31.
<https://doi.org/10.1080/24761028.2023.2281165>
- Carter, B. (2022). Revisiting the Bandwagoning Hypothesis: A Statistical Analysis of the Alliance Dynamics of Small States. *SAGE publication*.
<https://doi.org/10.1177/0020881722108541>
- Chandra, V. (2017). Neoclassical realist theory of international politics. *Strategic Analysis*, 41(3), 240. <https://doi.org/10.1080/09700161.2017.1295611>
- Chavez, L. (2024, Februari 5). *What’s next for the US-Philippines basing agreement?* Defense News. <https://www.defensenews.com/global/asia-pacific/2024/02/05/whats-next-for-the-us-philippines-basing-agreement/>
- Cheng-Chwee Kuik. (2021). Getting hedging right: A small-state perspective | China International Strategy Review. *China International Strategy Review*, 3, 311.
- Christine B Tenorio, Patrik K Meyer, & Achmad Nurmandi. (2022). President Duterte’s bicephalous leadership: Populist at home – pragmatic abroad. *Sage Journals*, 7(1). <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2057891120912008>

- De Castro, R. C. (2024). Exploring the Philippines' Evolving Grand Strategy in the Face of China's Maritime Expansion: From the Aquino Administration to the Marcos Administration. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(1), 94–119.
<https://doi.org/10.1177/18681034241234670>
- EIA. (2024). *Regional Analysis Brief: South China Sea* (Regional Analysis Brief).
https://www.eia.gov/international/content/analysis/regions_of_interest/South_China_Sea/south_china_sea.pdf
- Gonzalez, M. (2023, Maret 22). Philippines gives US access to military sites in northern Luzon and Palawan. *RAPPLER*. <https://www.rappler.com/philippines/marcos-jr-new-military-bases-united-states-edca-scattered-philippines/>
- Haacke, J. (2003). *ASEAN's Diplomatic and Security Culture: Origins, Development and Prospects*. Routledge.
- Haena Jo. (2018). Philippines military modernisation: Revamped but not resolved [Research Analyst for Defence and Military Analysis]. *IISS*.
<https://www.iiss.org/online-analysis/military-balance/2025/062/philippines-military-modernisation-revamped-but-not-resolved/>
- Hart, M. (2021, September 23). China's Belt and Road Runs Aground in the Philippines. *Geopolitical Monitor*. <https://www.geopoliticalmonitor.com/chinas-belt-and-road-runs-aground-in-the-philippines/>
- He, K. (2008). Institutional Balancing and International Relations Theory: Economic Interdependence and Balance of Power Strategies in Southeast Asia. *European Journal of International Relations*, 14(3), 489–518.
<https://doi.org/10.1177/1354066108092310>
- Holt, S. M. (2022, November 18). Five countries, other than China, most dependent on the South China Sea. *CNBC*. <https://www.cnn.com/2022/11/18/five-countries-other-than-china-most-dependent-on-the-south-china-sea.html>
- Joining the dashes. (2014, Oktober 4). *The Economist*, Vol.413(No. 8908).
<https://www.economist.com/asia/2014/10/04/joining-the-dashes>
- Little, R. (Ed.). (2007). Kenneth N. Waltz's Theory of International Politics. Dalam *The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models* (hlm. 167–212). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511816635.006>
- Magcamit, M. (2020). The Duterte method: A neoclassical realist guide to understanding a small power's foreign policy and strategic behaviour in the Asia-Pacific. *Asian Journal of Comparative Politics*, 5(4), 416–436.
<https://doi.org/10.1177/2057891119882769>
- Mahadzir, D. (2023, Agustus 7). VIDEO: China Coast Guard Blast Philippine Military Resupply with Water Cannons. *USNI News*.
<https://news.usni.org/2023/08/07/video-china-coast-guard-blast-philippine-military-resupply-with-water-cannons>

- Manfredi Sánchez, J., Herranz De La Casa, J., & Calvo Rubio, L. (2017). *Transparency and Diplomacy: New social demands and professional routines* (72 ed.). Revista Latina de Comunicación Social. <https://doi.org/10.4185/RLCS-2017-1195en>
- Michael I Magcamit & Aries A Arugay. (2024). Explaining populist securitization and Rodrigo Duterte's anti-establishment Philippine foreign policy | International Affairs | Oxford Academic. *Oxford Academic*, 100(5), 1877–1897.
- Motin, D. (2024). *Bandwagoning in International Relations: China, Russia, and Their Neighbors*. Vernon Press.
https://www.researchgate.net/publication/377360556_Bandwagoning_in_International_Relations_China_Russia_and_Their_Neighbors
- Natalia, D. L. (2025, Juli 13). Beijing protes Filipina peringati putusan Arbitrase 2016 atas LCS. *Antara News (Jatim)*.
<https://jatim.antaranews.com/berita/945897/beijing-protes-filipina-peringati-putusan-arbitrase-2016-atas-lcs>
- Parameswaran, P. (2016, Maret 19). A Big Deal? US, Philippines Agree First 'Bases' Under New Defense Pact. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2016/03/a-big-deal-us-philippines-agree-first-bases-under-new-defense-pact/>
- Paul, M. (2016). A "Great Wall of Sand" in the South China Sea? Political, Legal and Military Aspects of the Island Dispute (Research Paper No. 2016RP08; SWP Research Paper, hlm. 13–14). Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).
https://www.swp-berlin.org/publications/products/research_papers/2016RP08_pau
- Paul, T. V., Wirtz, J. J., & Fortmann, M. (2004). *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=9jy28vBqscQC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>
- Pedrozo & Raul "Pete." (2022). *The U.S. Freedom of Navigation Program | The National Bureau of Asian Research (NBR)* [Policy Brief]. National Bureau of Asian Research. <https://www.nbr.org/publication/the-u-s-freedom-of-navigation-program/>
- Permanent Court of Arbitration, P. C. of A. (n.d.). *UNCLOS Arbitration Services* [Web Page]. Permanent Court of Arbitration. <https://pca-cpa.org/services/arbitration-services/unclos/>
- Pitlo III, L. B. (2020, Februari 27). The Philippines Post-VFA: No Easy Choices. *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2020/02/the-philippines-post-vfa-no-easy-choices/>
- Pransuamitra, P. A. (2023). *PBoC Pangkas Suku Bunga, Bukti Ekonomi China Parah* [Newspaper]. CNBC Indonesia.
<https://www.cnbcindonesia.com/research/20230613143858-128-445500/kejutan-pboc-pangkas-suku-bunga-bukti-ekonomi-china-parah>

- Rabena, A. J. (2018). The Complex Interdependence of China's Belt and Road Initiative in the Philippines. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 5(3), 683–697. <https://doi.org/10.1002/app5.257>
- Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy. *World Politics*, 51(1), 144–172. <https://doi.org/10.1017/S0043887100007814>
- Rowman, & Littlefield. (2017). *State and Society in the Philippines* (2 ed.). Lanham, Maryland. <https://rowman.com/ISBN/9781442264892/State-and-Society-in-the-Philippines-Second-Edition>
- Santarita, J. B., & Gerstl, A. (2024). Examining the Philippines' infrastructure and connectivity cooperation with China and the European Union. *Discover Global Society*, 2(1), 56. <https://doi.org/10.1007/s44282-024-00076-2>
- Schweller, R. L. (1994). Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In. *International Security*, 19(1), 72. <https://doi.org/10.2307/2539149>
- Sebastian Strangio. (2024, Mei 1). *China Coast Guard Again Fires Water Cannons at Philippine Vessels Near Disputed Shoal: He incident near Chinese-occupied Scarborough Shoal caused damage to two vessels, the Philippine government said.* The Diplomat. <https://thediplomat.com/2024/05/china-coast-guard-again-fires-water-cannons-at-philippine-vessels-near-disputed-shoal/>
- Shang-Su Wu & Albao, J. D. P. (2023). *The Philippines' Security in the Face of China's Rising Threats* [Commentary]. U.S. Army War College. <https://publications.armywarcollege.edu/News/Display/Article/3974669/the-philippines-security-in-the-face-of-chinas-rising-threats/>
- Thao, N. H. T. (2019). The Philippines and Vietnam's Responses to the Permanent Court of Arbitration's Final Award on the Arbitration Case Initiated by the Philippines Against China over the South China Sea (July 2016). *Vienna Journal of East Asian Studies*, 11(2), 155–178. <https://doi.org/10.2478/vjeas-2019-0006>
- Vuving & Alexander L. (2016). South China Sea: Who Occupies What in the Spratlys? *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2016/05/south-china-sea-who-claims-what-in-the-spratlys/>
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of International Politics*.
- Wojciuk, A. (2021). Balancing Is in the Eye of the Beholder: Explaining the Critical Case of Late Imperial China. *The Chinese Journal of International Politics*, 14(4), 530–553. <https://doi.org/10.1093/cjip/poab011>